

VOL. 13 JANUARI 2021



DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

**PERS MENJAGA  
KEHIDUPAN  
BANGSA**

**PERS INDONESIA  
PRIHATIN TERHADAP  
LARANGAN LIPUTAN**

**JURNALISME  
KOLABORASI**



## **PERS TETAP AKTIF LIPUTAN MESKI PANDEMI COVID-19**



COVER DIOLAH DARI FOTO: MUHAMMAD ADIMAJA (ANTARA)

# PERS MENJAGA KEHIDUPAN BANGSA

Oleh: **ASEP SETIAWAN**  
Anggota Dewan Pers 2019-2022



**D**i tengah berbagai tekanan baik gempuran dari *platform* digital yang menggerus kondisi ekonomi perusahaan pers maupun dari ancaman pandemi Covid-19 selama 2020, saatnya bangsa Indonesia mempertimbangkan lagi posisi pers yang penting dalam membangun dan menjaga bangsa yang demokratis. *Platform* digital yang didominasi oleh perusahaan raksasa dari Amerika Serikat memberikan tekanan yang luar biasa bagi media massa sehingga banyak yang kesulitan. Di satu sisi, terutama media siber di Indonesia juga mengharapkan *revenue* dari ikut bermain di *platform* digital tersebut. Namun dalam jangka panjang disadari bahwa perusahaan pers akan selalu dalam posisi kurang menguntungkan dalam menghadapi kekuatan perusahaan teknologi Amerika Serikat ini.

Demikian juga selama setahun terakhir, serangan Covid-19 ini telah melumpuhkan banyak perusahaan pers sekaligus menyebabkan kesulitan bagi para wartawan dalam mencapai kesejahteraannya. Banyak perusahaan mengurangi karyawannya dan juga sebagian menutup usahanya. Pandemi Covid-19 ini semakin memberikan tekanan berat kepada perusahaan pers dalam menghasilkan produk jurnalistik yang dapat diandalkan.

## MENJAGA PERS INDONESIA

Di tengah berbagai tekanan ini, mengapa pers ini kemudian menjadi penting bagi bangsa Indonesia? Siapa yang harus menjaganya? Mengapa justru pers dapat menjaga kehidupan bangsa? Bagi mereka yang mengetahui fungsi dan peranan pers dikaitkan dengan demokrasi di sebuah negara, maka akan paham bahwa sebesar apapun kekuatan media sosial, tidak akan pernah menggantikan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Media sosial dalam berbagai studi sudah menunjukkan kekuatan dan bahkan dalam tingkat tertentu dapat



WARTAWAN SAAT MELIPUT EVAKUASI KECELAKAAN SRIWIJAYA AIR, DALAM LIPUTAN PERS MENAMPILKAN GAMBAR-GAMBAR DARI LAPANGAN YANG TETAP MENUNJUKKAN JATI DIRI PERS UNTUK MEMEGANG NORMA-NORMA DAN ETIKA JURNALISTIK. (FOTO: DIANA KHARISMA PUTRI)

mengimbangi pers. Dari sisi kecepatan juga tidak kalah dengan awak media yang terjun meliput musibah Sriwijaya Air, misalnya. Namun demikian awak media telah memberikan kontribusi penting ketika mengangkat isu kemanusiaan seperti pencarian korban jatuhnya pesawat.

Namun demikian ada satu unsur penting dimana fungsi dan peran pers tidak dapat tergantikan. Pers bekerja secara profesional di bawah satu kode etik yang mendunia. Kode etik jurnalistik inilah yang memandu kerja pers sehingga apabila pers bekerja sesuai perannya maka bermanfaat dalam kehidupan bangsa. Sebaliknya jika pers terbungkam karena tekanan dari *platform* digital atau tekanan dari penguasa atau kelompok manapun maka akan berakibat buruk terhadap masa depan bangsa itu.

Demikian juga produk jurnalistik yang lahir di media elektronik dan cetak ini dilakukan melalui proses yang juga berjalan sama di seluruh dunia. Mulai dari perencanaan, pengumpulan data, wawancara, investigasi, pengolahan data, proses editorial dan baru kemudian ditayangkan di media penyiaran, cetak atau dimuat di media siber. Demikian siklus dari kerja perusahaan pers pada umumnya.

Pers dengan demikian akan memberikan fungsi pemberi informasi kepada publik yang sah karena dibangun dari tradisi jurnalistik yang sudah ratusan tahun usianya dan sudah menjadi fenomena sosial budaya yang melekat dalam kemajuan bangsa. Pers tidak dapat dihapuskan begitu saja oleh penguasa yang keras atau kekuatan manapun karena telah menjadi bagian dari kebudayaan manusia yang beradab.

## PERS MENJAGA KEHIDUPAN BANGSA

Dengan demikian meruntuhkan pers, mengecilkan pers dan menjadikan pers *marginal* dalam kehidupan bangsa dapat menjadi alamat bahwa bangsa tersebut akan melahirkan kediktatoran, keterpurukan dan bahkan mungkin masa depannya akan terganggu. Jika kemudian pers tidak diikutkan dalam membangun bangsa ke depan – karena alasan misalnya tekanan ekonomi, tekanan penguasa, tekanan lainnya – maka sudah menjadi sesuatu yang terbukti empirik bangsa itu cepat atau lambat akan mengalami hambatan dibandingkan perkembangan bangsa lainnya yang memiliki pers yang independen.

Keyakinan ini tentu tidaklah mudah dibangun karena seperti di Amerika Serikat yang sudah berdemokrasi selama 200 tahun pun tidak lepas dari gangguan pemimpin yang memusuhi pers independen. Bahkan sang pemimpin membangun kekuatan sendiri sendiri yang memunculkan berita-berita palsu dan hoax. Akhirnya upaya itu pun berakhir sia-sia. Pers dalam kondisi tertekanpun harus tetap tegak memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan.

Dalam konteks Indonesia, sebuah kolaborasi antara Satgas Covid-19 dengan komunitas pers misalnya, melahirkan gerakan yang mendorong perubahan perilaku sosial. Kerjasama ini dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 dan Dewan Pers yang mengajak 4.300 wartawan untuk meliput pandemi dengan perspektif perubahan perilaku yang kondusif un-

tuk penanggulangan pandemi covid 19. Kerjasama ini telah menunjukkan bahwa pers dapat memainkan peran ketika bangsa menghadapi kesulitan seperti wabah virus corona.

Contoh lain bagaimana pers memainkan peran penting menebarkan informasi, edukasi dan kontrol sosial adalah dalam kasus meninggalnya enam anggota sebuah ormas dalam sebuah peristiwa. Pers berusaha meliput secara independen dan kritis sehingga tidak terjadi perpecahan di kalangan masyarakat. Ketika terjadi kesalahan di pihak manapun pers tidak hanya melaporkan tetapi juga kalau perlu mengoreksi elemen bangsa yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam liputan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air juga misalnya, pers menampilkan gambar-gambar dari lapangan yang tetap menunjukkan jati diri pers untuk memegang norma-norma dan etika jurnalistik sehingga tidak mengarah kepada gambaran yang seram dan mengerikan. Liputan pers tetap menarik dan menunjukkan simpati dan empati kepada para korban sekaligus juga membangun harapan ke depan untuk perbaikan sistem penerbangan di Indonesia.

Kalau kita menoleh kepada media sosial melalui platform digitalnya yang sedang merajai dunia maya, maka pertanyaan besarnya ke arah mana media sosial ini berpihak dan konten seperti apa yang diprosesnya dan oleh siapa. Maka jika menjawab pertanyaan ke arah mana narasi media sosial mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, grup WhatsApp, maka tidak mendapatkan jawaban yang senada. Para pemain di ranah media sosial ini bekerja untuk kepentingan masing-masing sehingga tidak jarang terjadi tabrakan yang dapat meremukkan para pihak yang berseteru. Media sosial tidak lagi sebuah pergaulan sosial yang mengikuti norma, etik dan sopan santun. Namun karena karakternya yang bersifat pribadi maka sifat-sifat buruk manusia dapat muncul di media sosial mulai dari kalimat sumpah serapah sampai penggunaan bahasa yang dalam pergaulan normal jarang muncul. Ungkapan kasar itu tidak hanya keluar dari kalangan awam dan masyarakat biasa bahkan kalangan elit pun dapat terjebak kepada sifat-sifat dangkal sebagai seorang manusia.

Inilah yang kemudian muncul dalam *rending topic* di media sosial, sangat emosional dan sangat rawan karena memang tidak ada kebijakan editorial, tidak ada arah pemberitaan dan lebih-lebih lagi dikerjakan kadang-kadang oleh perorangan atau kelompok yang tidak profesional dalam mengelola informasi. Dengan kata lain, media sosial dapat menciptakan hukum rimba dimana yang kuat akan menang, meskipun salah. Sedangkan yang benar dapat tergerus meskipun benar. Itulah hukum besi dalam media sosial yang berbeda dengan media massa yang seharusnya dipandu oleh idealisme pers dan kode etik jurnalistik.

Media sosial di berbagai negara termasuk di Indonesia telah memberikan kontribusi positif juga karena kemudian hampir semua institusi baik swasta maupun pemerintah, baik pakar maupun seniman semua terjun memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan dirinya. Bahkan pers juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten yang dibuatnya.



*...satu unsur penting dimana fungsi dan peran pers tidak dapat tergantikan. Pers bekerja secara professional di bawah satu kode etik yang mendunia Kode etik jurnalistik inilah yang memandu kerja pers sehingga apabila pers bekerja sesuai perannya maka bermanfaat dalam kehidupan bangsa.*

Lembaga yang menjadi tuan rumah dari media sosial ini juga tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Dan kecenderungannya memusat kepada beberapa perusahaan raksasa dari Amerika Serikat. Yang jika berkembang tanpa kontrol maka tidak hanya merugikan kehidupan bangsa – karena misalnya dapat menjadi biang perpecahan, sumber berita palsu, disinformasi dan hasutan – tanpa adanya rasa tanggung jawab dari pemilik platform digital ini terhadap konten dan narasi yang muncul.

Ketika media sosial semakin kuat, maka yang untung besar adalah perusahaan *big data* yang ada di Amerika Serikat. Sedangkan jika pers yang kuat maka dia akan menopang masa depan kehidupan sebuah bangsa karena pers memiliki tanggung jawab kepada kepentingan publik, pers harus independen dan pers menjadi mitra semua pihak dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi pilihan bangsa Indonesia saat ini adalah apakah pers akan dibiarkan mati karna virus corona atau karena tekanan raksasan perusahaan digital dari luar negeri. Atau pers perlu dirawat bersama sehingga keberadaannya menjadi kekuatan bagi bangsa itu sendiri, mengingatkan bangsa dan sekaligus menjaga bangsa dari berbagai ancaman baik dari ancaman yang sifatnya dibuat manusia atau ancaman alamiah seperti virus corona. Maka jika pers maju maka bangsa Indonesia juga akan maju dan kuat. Selamat Hari Pers Nasional. ●

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS PERIODE JANUARI-DESEMBER 2020

Revisi Standar Perusahaan Pers, salah satunya dijalankan melalui penyesuaian standar Verifikasi Perusahaan Pers

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
Terverifikasi Administratif dan Faktual	42	0	3	100	145
Terverifikasi Administratif	57	3	3	201	264
Belum Terverifikasi	573	76	157	3154	3960
Media Mendata	672	79	163	3455	4369

REKAP: DATA PELAKSANAAN UKW 2019 DAN 2020

PENYELENGGARAAN UKW TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA UKW	JUMLAH PENYELENGGARA UKW	MUDA	MADYA	UTAMA	TOTAL PESERTA KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	TOTAL SELURUH PENDAFTAR
1	PWI	67	1066	101	35	1202		1202
2	AJI	6	65	19	26	110		110
3	IJTI	9	129	1	0	130	5	135
4	LPDS	9	148	15	9	172		172
5	UPN Yogja	4	52	2	0	54	4	58
6	LSPR	3	43	4	1	48	0	48
7	LKBN ANTARA	1	13	1	3	17		17
8	Dewan Pers	1	0	0	4	4		4
9	Kompas	1	15	0	0	15		15
	Grand Total	101	1531	143	78	1752	9	1761

PENYELENGGARAAN UKW UKW JANUARI TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA UKW	JUMLAH PENYELENGGARA UKW	MUDA	MADYA	UTAMA	TOTAL PESERTA KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	TOTAL SELURUH PENDAFTAR
1	PWI	23	410	71	18	499		499
2	AJI	4	65	9	23	97		97
3	IJTI	5	82	1	0	83	1	84
4	LPDS	1	10	0	0	10		10
5	UPN Yogja	2	21	0	0	21	9	30
6	LSPR	1	5	0	0	5		5
7	LKBN ANTARA	1	18	6	6	30		30
8	Tempo	1	0	5	10	15		15
9	Univ. Moestopo	1	12	0	1	13		13
	Grand Total	39	623	92	58	773	10	783

# PERS INDONESIA PRIHATIN TERHADAP LARANGAN LIPUTAN

Pers Indonesia merasa prihatin dengan adanya maklumat yang isinya secara tidak langsung antara lain larangan liputan media massa dalam kasus terkait Front Pembela Islam (FPI). Pembatasan yang dilakukan melalui maklumat atau pengumuman yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dapat mengganggu kemerdekaan pers. Oleh sebab itulah maka diharapkan maklumat itu tidak diterapkan terhadap media massa di Indonesia.

Demikian pandangan peserta diskusi Dewan Pers dengan Konstituen Dewan Pers serta kalangan wartawan senior terkait adanya maklumat Polri yang dikeluarkan bulan Januari 2021 melalui diskusi virtual hari Senin, 4 Januari 2021.

Sebelumnya sejumlah organisasi wartawan memprotes isi maklumat terutama poin 2d dalam maklumat tersebut. Dalam poin 2d itu disebutkan "Masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebarkan konten terkait FPI baik melalui *website* maupun media sosial".

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH memberikan apresiasi kepada komunitas pers yang telah menyatakan atau mengeluarkan sikap yang merespon maklumat tersebut. Dewan Pers, jelas Mohammad NUH, memberikan dukungan terhadap sikap organisasi profesi yang memprotes isi maklumat terhadap larangan meliputi karena terkait kemerdekaan pers. Sikap organisasi pers itu harus juga disampaikan sampai ke daerah-daerah di Indonesia agar tidak ada penggunaan kewenangan yang me-

lebih batas-batas peraturan dan perundangan yang ada.

Dalam dialog dengan kalangan pers itu terungkap bahwa organisasi pers dan tokoh pers juga langsung menghubungi pihak Polri agar poin 2d tersebut tidak dikenakan terhadap media massa. Terungkap pula dalam dialog ini bahwa pihak Polri akan mengeluarkan panduan yang menjelaskan bahwa larangan liputan terhadap kasus terkait FPI tidak berlaku untuk pers dan berlaku hanya untuk media sosial. Dilaporkan juga bahwa pihak Polri telah mengeluarkan telegram kepada jajarannya yang menyebutkan bahwa poin 2d tidak berlaku untuk media massa.

Yang menjadi keprihatinan kalangan pers adalah jangan sampai terjadi karena wartawan memberitakan kasus itu kemudian dipersalahkan oleh



MAKLUMAT ATAU PENGUMUMAN YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

pihak berwenang. Oleh karena itulah maka masyarakat pers harus tetap berjaga-jaga karena kalau kasus ini timbul maka akan jadi preseden ketidakpercayaan terhadap Polri.

## REGULASI BERLEBIHAN

Dari dialog Dewan Pers dengan konstituen seperti Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia serta organisasi pers dan kalangan wartawan senior terungkap bahwa regulasi yang dikeluarkan itu berlebihan. Artinya sebuah maklumat itu

sebenarnya kewenangannya terbatas dan jangan sampai melanggar perundangan seperti Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999. Oleh sebab itu juga salah satu organisasi profesi wartawan mengeluarkan sikap agar maklumat itu dicabut.

Pers berharap bahwa walaupun kemudian terjadi koreksi terhadap poin 2d itu yang disebut tidak berlaku untuk media massa, namun kalangan pers tetap berpendapat maklumat itu tidak diperlukan. Oleh sebab itulah maka pers perlu tetap memantau agar maklumat yang terkait larangan liputan itu jangan sampai menjadi kasus

yang mengganggu kemerdekaan pers di Indonesia.

Dalam pertemuan juga ditegaskan bahwa penjelasan pihak Polri yang hanya lisan bahwa tidak berlaku untuk pers perlu keterangan tertulis sehingga mencegah terjadinya kasus-kasus di lapangan. Selain itu penjelasan tertulis juga dapat menjadi pegangan para pihak dalam kasus liputan terkait FPI.

Salah seorang peserta menambahkan bahwa terbitnya maklumat itu menimbulkan kesan bahwa sebuah institusi berjalan "di luar kewenangannya". Oleh sebab itu perlu selalu diingatkan kepada semua pihak bahwa kemerdekaan pers telah dijamin di Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang Pers No 40/1999 seperti halnya juga kebebasan menyatakan pendapat dijamin konstitusi.

Sementara peserta lain menyampaikan bahwa perlu pemahaman mengenai apa itu *website* oleh berbagai pihak di Indonesia. Dengan adanya pemahaman apa yang disebut *website* dimana pers juga menggunakannya tidak timbul masalah di kemudian hari. Demikian juga kata "media sosial" meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika mengawasi kontennya namun sebagian besar pers Indonesia juga menggunakan media sosial sebagai salah satu distribusi kontennya. Oleh sebab itulah perlu ditingkatkan pemahaman terhadap penggunaan *website* untuk media massa dan juga bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh pers Indonesia.

Terkait penggunaan media sosial dalam kasus FPI, salah seorang peserta diskusi juga menyatakan prihatin karena akan berdampak terhadap kalangan netizen. Artinya kalau pers dapat menyampaikan langsung kepada pihak Polri rasa prihatin atas maklumat itu namun kalangan netizen akan mendapatkan kesulitan. Itulah mengapa perlu juga mengangkat isu ini dalam komunikasi dengan institusi Polri. Kalangan pers tetap harus menjaga kemerdekaan pers di Indonesia tetapi saat bersamaan juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat masyarakat juga telah dijamin konstitusi. • (Redaksi Etika)



DEWANPERS

**Berita Dewan Pers ETIKA:** Terbit Bulanan, • Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, • Ketua: Mohammad NUH, • Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, • Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, • Kepala Sekretariat: Syaefudin, • Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH, • Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, • Tim Redaksi: Herutjahjo Soewardjo, Shanti Ruwiyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Iwhan Sudarwanto BR,

**Alamat Redaksi:** Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

• dewanpers • @officialdewanpers • Dewan Pers • Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

# JURNALISME KOLABORASI

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**  
Tenaga Ahli



Setelah satu tahun lamanya masyarakat dunia hidup berdampingan dengan virus Corona, industri media termasuk salah satu yang harus beradaptasi dan mengadopsi tatanan hidup normal yang baru. Selain merealisasikan percepatan penggunaan dalam jaringan dan teknologi digital, perusahaan pers juga membekali jurnalisnya dari ancaman pandemi Corona dengan menyediakan peralatan prokes seperti masker

dan *hand sanitizer*, melakukan tes rapid antigen dan PCR serta menjajaki kemungkinan menyediakan vaksin untuk jurnalis secara mandiri. Pers Indonesia juga diharapkan menjajaki masa depan jurnalis, yaitu kolaborasi.

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien satu dan dua COVID-19 pada 3 Maret 2020, *newsroom* di Indonesia ketat memproteksi para jurnalisnya dari ancaman COVID-19 dengan mengizinkan jurnalis bekerja dari rumah. Namun demikian, kemudahan ini menghambat proses reportase dan verifikasi. Apalagi sumber berita membuat konferensi pers daring searah tanpa sesi tanya jawab dengan wartawan. Kemudahan lain, jurnalis bisa menyimak webinar lintas negara tentang perkembangan riset virus Corona dan vaksin COVID-19, seperti webinar "Covering the COVID-19 Vaccine: What Journalists Need to Know" hasil kerjasama WHO dan *Knight Center for Journalism in the Americas* pada 29 Januari 2021. Jurnalis juga menghemat waktu karena sumber berita mengirimkan video dan foto melalui aplikasi daring dan tidak melakukan perjalanan. Tentu saja kemudahan-kemudahan tersebut tidak berlaku saat *breaking news*. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu dan gempa bumi di Sulawesi Barat misalnya, menimbulkan kekhawatiran penularan virus Corona terhadap wartawan karena terjadi kerumunan spontanitas saat melakukan peliputan meskipun masing-masing reporter, juru kamera dan fotografer sudah memakai masker.

Akibat pandemi, perusahaan media terpaksa memotong gaji, memberhentikan jurnalis atau bahkan menyatakan diri bangkrut karena pemasukan iklan menurun sampai dengan 40 persen atau sama sekali tidak ada. Melihat fenomena ini, Dewan Pers bekerjasama dengan Satgas COVID-19 meluncurkan *Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku* yang berlangsung antara Oktober sampai dengan Desember 2020. Target utama *Fellowship* adalah para jurnalis yang terkena PHK dan pemotongan gaji serta memenuhi persyaratan seperti lu-



UJI KOMPETENSI WARTAWAN

lus uji kompetensi wartawan dan perusahaan yang mensponsornya lolos verifikasi perusahaan media oleh Dewan Pers. Meskipun *Fellowship* ini dibiayai oleh APBN, Satgas COVID-19 mengklaim jurnalis peserta program beasiswa ini tetap independen.

Di dalam program beasiswa ini, jurnalis dituntut menjadi agen perubahan perilaku dengan mengedukasi publik dalam menghadapi bencana nasional. Wartawan diharapkan menulis berita dengan perspektif perubahan perilaku untuk mencegah penularan COVID-19. Para wartawan memperkaya konten berita yang menekankan perilaku disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pada bulan September 2020, ada 7.000 jurnalis dari 34 provinsi yang mendaftar melalui aplikasi *fellowship*, namun hanya 5.000 orang editor dan reporter yang lolos perekrutan. Pada bulan Oktober 2020 tercatat sebanyak 42.105 artikel yang diserahkan dan dipublikasikan di media peserta. Pada bulan November 2020 ada 68.028 artikel dan sampai dengan 13 Desember 2020, ada 17.549 artikel yang masuk dan terbit di media partisipan. Dengan demikian, ada total 127.640 item berita yang masuk dan terbagi ke dalam kategori media cetak 35.964 berita, media siber 58.574 berita, televisi 29.914 berita, radio 3.158 berita dan media ubahlaku 61 berita.

Di dalam webinar peserta *fellowship* dengan pemangku kepentingan pers, Satgas COVID-19 dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 14 Desember 2020, Ketua Umum PWI Atal Depari menyambut baik *Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku*. *Fellowship* bukan hanya membantu jurnalis dalam kondisi per-

ekonomian yang sulit, namun juga menempatkan wartawan di garda depan dalam mendiseminasi informasi tentang protokol kesehatan 3M: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ketua Dewan Pers Mohammad NUH mengutip ilmuwan Charles Darwin, bahwa penyintas itu bukanlah yang paling kuat atau paling pintar namun yang paling responsif terhadap perubahan. Dalam hal ini, jurnalis menjadi agen perubahan perilaku saat menghadapi bencana nasional ini. Baik Ketua Umum PWI maupun Ketua Dewan Pers mengharapkan *fellowship* diperpanjang tiga bulan atau bahkan satu semester pada tahun 2021. Ketua BNPB sekaligus Satgas COVID-19 Doni Monardo merasa sangat terbantu oleh peserta *fellowship* dalam mengklarifikasi berita tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta memerangi hoax seputar pandemi Corona. Doni berharap *fellowship* ini bisa dilanjutkan pada tahun 2021. Akhirnya, saat memberikan arahan dan pembekalan untuk para peserta *fellowship*, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin juga mendukung dilanjutkannya *Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku* pada tahun 2021.

Akibat banyaknya iklan layanan masyarakat dan program pemulihan ekonomi yang disponsori Pemerintah Indonesia di mediana, jurnalis segan bersikap kritis. Sponsor Pemerintah ini bertujuan membantu keberlangsungan hidup perusahaan pers saat pandemi, sehingga terkesan jurnalis lebih fokus pada pemulihan ekonomi padahal penularan virus Corona itu sendiri semakin tidak terkendali. Seorang pemimpin redaksi menyebut istilah kolaborasi, bersikap kritis namun aspek bisnis perusahaan pers tetap harus dijalankan. Apalagi tingginya angka harian penularan COVID-19 sejak Desember

2020 sampai sekarang yang menyebabkan Indonesia belum juga melewati kurva pandeminya yang pertama. Ada beberapa isu yang bisa dikritisi pers. Pemerintah terlambat meluncurkan aplikasi daring untuk calon pasien tentang informasi RS mana yang masih memiliki tempat tidur sehingga banyak pasien yang meninggal saat menunggu mendapatkan kamar rawat inap atau ICU. Belum diumumkan hasilnya uji klinis vaksin Sinovac tahap ketiga di Bandung meskipun sudah ada otorisasi penggunaan dari BPOM. Pemerintah belum optimal menjalankan 3T: *testing* PCR masih kurang, rendahnya *tracing* kontak yang berinteraksi dengan orang yang terpapar dan semakin tertekannya *treatment* karena *bed-occupancy-ratio* di rumah-rumah sakit melebihi 80 persen. Ketidaksinkronan data nakes penerima vaksin COVID-19 dengan kondisi di lapangan dan informasi tentang vaksin mandiri yang masih simpang siur dari Kementerian Kesehatan.

Ketika *newsroom* di Indonesia memaknai jurnalisme kolaborasi sebagai kerjasama dengan Pemerintah, perusahaan pers Amerika Serikat memaknainya secara berbeda. Jurnalis yang biasanya sangat kompetitif justru memutuskan untuk berkolaborasi saat meliput dan menulis pada masa pandemi ini. Menurut artikel Nieman Reports tahun 2020 dari Harvard University "*Collaboration is The Future of Journalism*", jurnalis, universitas dan lembaga non profit berkolaborasi tentang data COVID-19 di kalangan masyarakat AS keturunan Latin dan kulit hitam. Reporter Kantor Berita Associated Press (AP) Kat Stafford menulis tentang ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat kulit hitam di kota Detroit, AS. Pasien-pasien COVID-19 yang berkulit hitam ditolak dirawat di rumah sakit sehingga beberapa diantaranya meninggal dunia di rumah mereka. Stafford dan delapan reporter lainnya mulai menggali data di berbagai negara bagian tentang ketidakadilan pelayanan kesehatan berdasarkan ras. Untuk menganalisis data dalam berbagai format, Stafford menggunakan DataKit, sebuah open-source tool milik AP. DataKit menyinkronisasi data, memungkinkan reporter mengerjakan beberapa proyek secara serentak, berdialog dan membangun cerita berdasarkan data.

Seorang reporter ProPublica Adriana Gallardo yang juga mengajar kelas advanced reporting di *Craig Newmark Graduate School of Journalism* di CUNY, meminta para mahasiswanya memperluas peliputan dari masyarakat Latin yang terdampak COVID-19 di New York menjadi di AS. Gallardo berkolaborasi dengan ProPublica dan jaringan televisi Univision. Gallardo memiliki sumber daya manusia, ProPublica memiliki perangkat peliputan dan Univision memiliki jangkauan pemirsa masyarakat Latin di Amerika. Tim ini memakai Collaborate, sebuah open-source tool milik ProPublica yang mengunggah dataset dari *Google Sheets*, *Screendoor*, *Google Forms* ke satu wadah sehingga reporter bisa memilah, memverifikasi, mengklaim dan melaporkan berdasarkan data. Kolaborasi ini menghasilkan kisah-kisah masyarakat Latin yang menunggu transplantasi paru-paru, ibu-ibu yang menjadi guru selama anak-anak bersekolah dari rumah, 4 perempuan transgender yang me-



## Target utama Fellowship adalah para jurnalis yang terkena PHK dan pemotongan gaji serta memenuhi persyaratan seperti lulus uji kompetensi wartawan dan perusahaan yang mensponsorinya lolos verifikasi perusahaan media oleh Dewan Pers.

ngalami diskriminasi dan seorang imigran ilegal yang sudah puluhan tahun bekerja di New York, namun karena statusnya tidak memiliki proteksi kesehatan selama pandemi.

Pembatasan bagi jurnalis untuk melakukan reportase selama pandemi melahirkan inisiatif kolaborasi *Summer of Solidarity* dan *COVID Collaboration Wire* di Eropa. Pendiri *Summer of Solidarity*, seorang reporter The Guardian yang sedang cuti Natalie Nougayrede, menggabungkan warga, jurnalis, perusahaan rintisan media (*media start-up*), organisasi masyarakat sipil dan kelompok kebudayaan dari berbagai penjuru Eropa. Kolaborasi ini mengangkat kisah-kisah bagaimana COVID-19 mendorong anak muda di Italia pindah ke pegunungan, aktifis Jerman memerangi krisis perawatan anak saat pandemi dan seorang pria Polandia yang menemukan kembali kisah tentang keluarganya saat PSBB di kota Krakow. *Hostwriter*, sebuah jaringan yang berbasis di Berlin, mengorganisasi kolaborasi lebih dari 5.300 jurnalis dan editor freelance di 154 negara. Karena restriksi perjalanan akibat pandemi, *Hostwriter* meluncurkan *COVID Collaboration Wire*, sebuah tool yang mempertemukan editor dan jurnalis yang bukan anggota *Hostwriter* untuk menulis. Dengan jaringan jurnalis di ratusan negara, pendiri *Hostwriter* Tabea Grzeszyk berharap konten cerita menjadi beragam dan mengangkat konten lokal ketimbang menerapkan jurnalisme yang mengambang di udara (*parachute journalism*). Kata Tabea Grzeszyk, "Paradigma jurnalisme 'kami membenci satu sama lain, kami semua ingin menjadi yang pertama' adalah paradigma lama." Dari praktik-praktik terbaik di Amerika dan Eropa, terlihat jelas bahwa masa depan jurnalisme adalah kolaborasi. Apakah *newsroom* Indonesia akan mengikuti jejak mereka? ●



## DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

### Pernyataan Awal Tahun Dewan Pers

Dewan Pers mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 kepada segenap mitra kerja dan pemangku kepentingan, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan dan pertolongan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh Bangsa dan Negara Indonesia.

Dewan Pers mendorong semua pihak untuk tetap optimis, semangat dan konsisten (istiqomah), bekerja bersama dalam upaya menekan penyebaran dan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak-dampaknya.

Terkait perkembangan akhir-akhir ini, Dewan Pers menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Kemerdekaan menyatakan pendapat dan berekspresi merupakan hak warga negara yang dilindungi Undang Undang Dasar, dan kemerdekaan pers merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi tersebut.
2. Kemerdekaan pers merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan harus diperjuangkan bersama.
3. Dewan Pers mengajak semua pihak untuk menciptakan kondusivitas dan tekad bersama, agar kemerdekaan pers semakin berkualitas dan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4. Dalam momentum awal tahun 2021 ini, Dewan Pers mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melaksanakan spirit dan perintah yang termaktub dalam UU Pers No. 40 tahun 1999. Dalam negara demokrasi, pers bebas untuk memberitakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik dengan senantiasa menaati Kode Etik Jurnalistik. Secara prinsipil dan moral, negara berkewajiban untuk menghindari atau meminimalisir hambatan dan batasan atas kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. Setiap masalah yang timbul terkait dengan praktik jurnalistik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

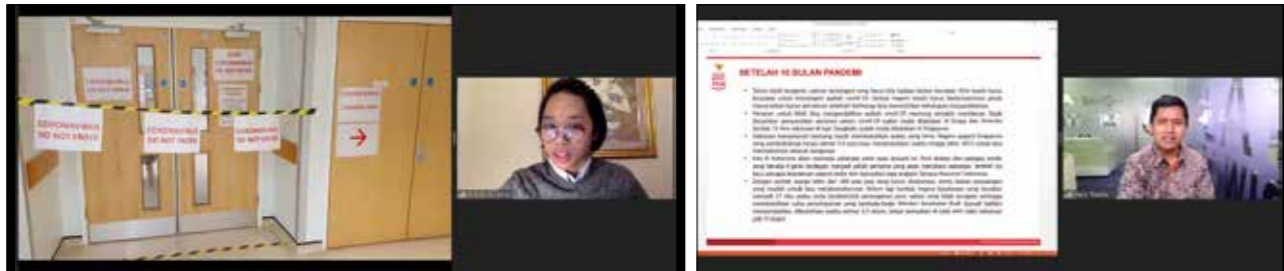
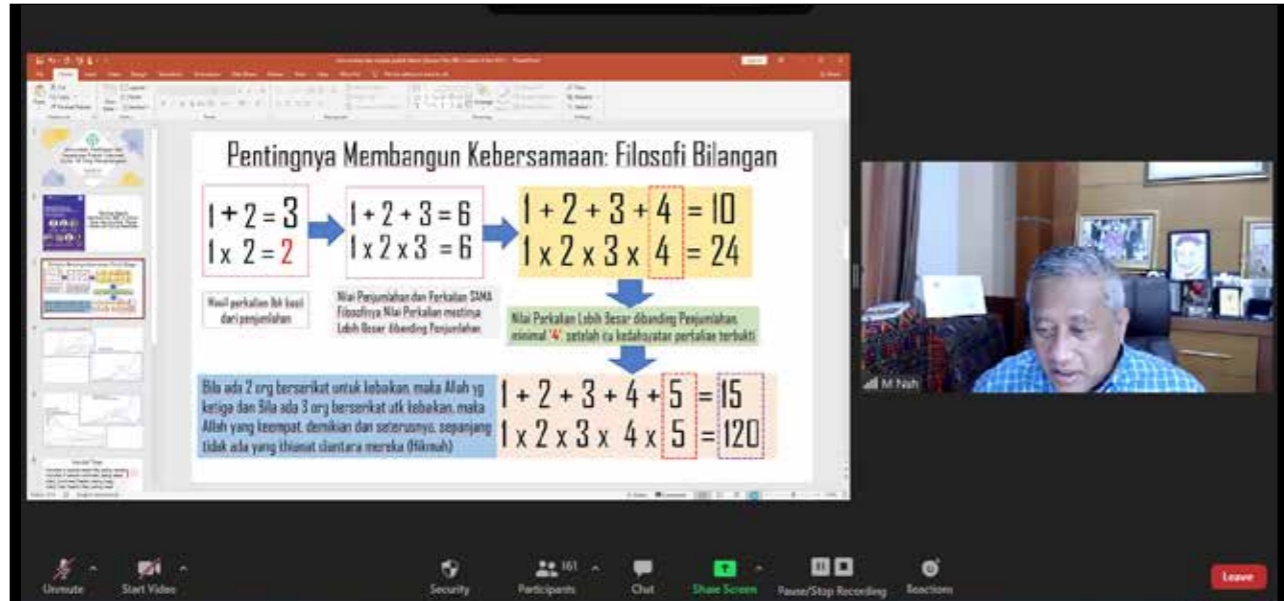
Jakarta, 2 Januari 2021

Dewan Pers  
  
 M. Agung NUH  
 Ketua  
 DEWANPERS

Narahubung :

- Agus Sudibyo : 0811865062
- M. Agung Dharmajaya : 0818912099

## GALERI DEWAN PERS



**DEWAN PERS** bekerjasama dengan BBC Media Action mengadakan seri diskusi yang dikemas dalam webinar bertajuk "Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku Dan Informasi Publik" dengan tema "Persepsi Publik dan Vaksinasi COVID-19 untuk Masyarakat" pada Jumat, (8/1) dengan menghadirkan narasumber yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo; Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH; Satgas COVID-19, Hery Trianto; Dokter dari National Health Service (NHS), Ardito Widjono; Laporan COVID-19, Irma Handayana, dan anggota Dewan Pers, Ahmad Djuhar.

Dalam webinar yang dimoderatori oleh Helena Rea tersebut dibahas mengenai bagaimana masyarakat perlu diyakinkan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan besarnya peran pers dalam menyosialisasikan hal tersebut. ●



## GALERI DEWAN PERS



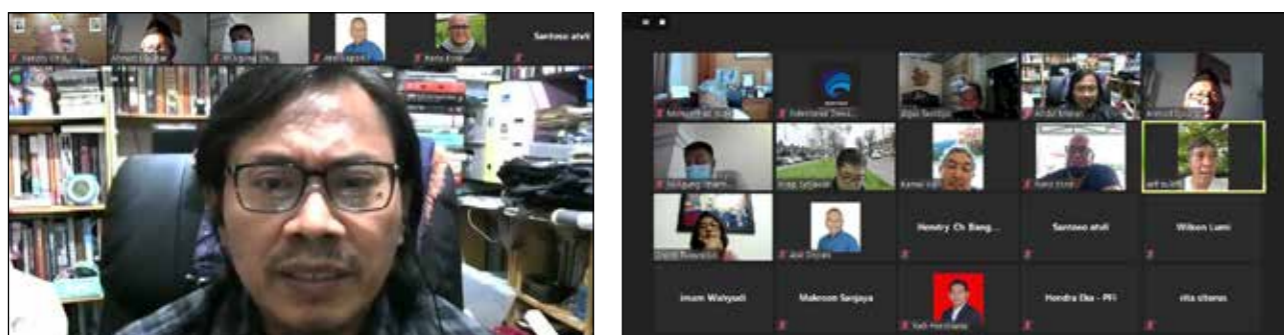
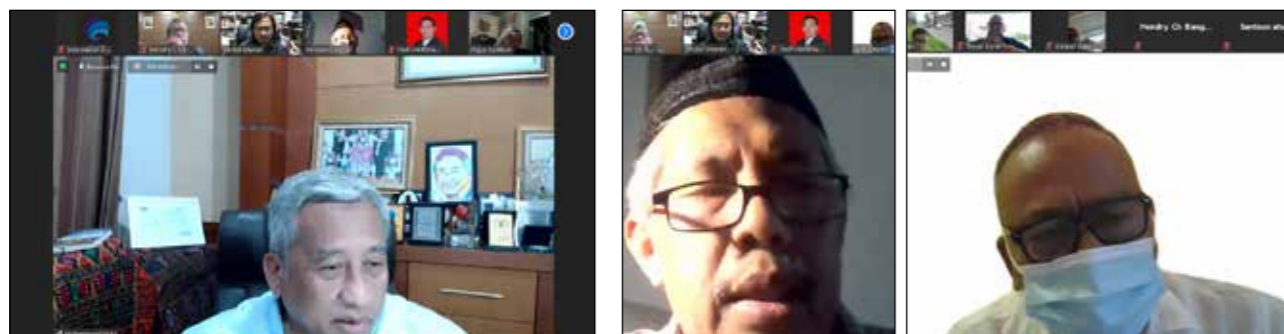
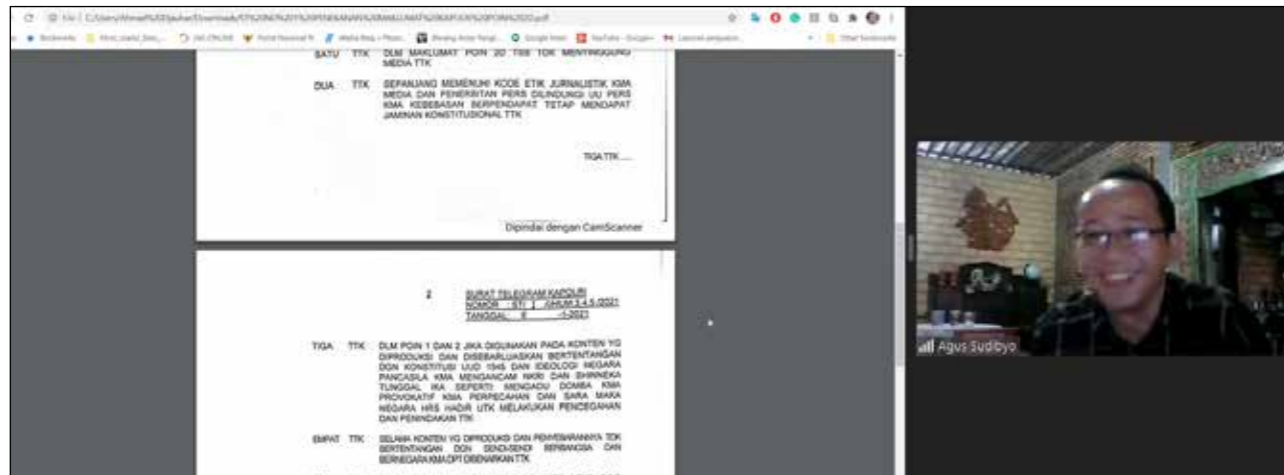
**KOMISI** Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) bersama 4 lembaga HAM lainnya (Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang tergabung dalam tim Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) bekerjasama dengan Dewan Pers mengadakan webinar dengan tema "Dukungan Pers Terhadap Pencegahan Penyiksaan" Jakarta, Selasa, (26/1).

Webinar tersebut dilaksanakan secara hybrid yaitu dengan offline yang berlokasi di Gedung Hall Dewan Pers, Jakarta dan secara online melalui zoom meeting. Webinar dimulai dengan sambutan dari Wakil Ketua Komnas HAM, Amirrudin dan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun lalu dilanjutkan dengan diskusi yang diisi oleh para panelis antara lain Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam, Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pers periode 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo, dan moderator dalam webinar tersebut adalah Anggota Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya.

Webinar tersebut membahas bagaimana pers dapat berperan dalam mengurangi tindak penyiksaan dan menyosialisasikan mekanisme pencegahan penyiksaan pada komunitas pers dan publik. Kepentingan pers dalam upaya mencegah terjadinya (kembali) penyiksaan bukan saja karena sudah banyak pekerja pers yang menjadi korban, melainkan juga karena peran inheren dari media pers. ●



# GALERI DEWAN PERS

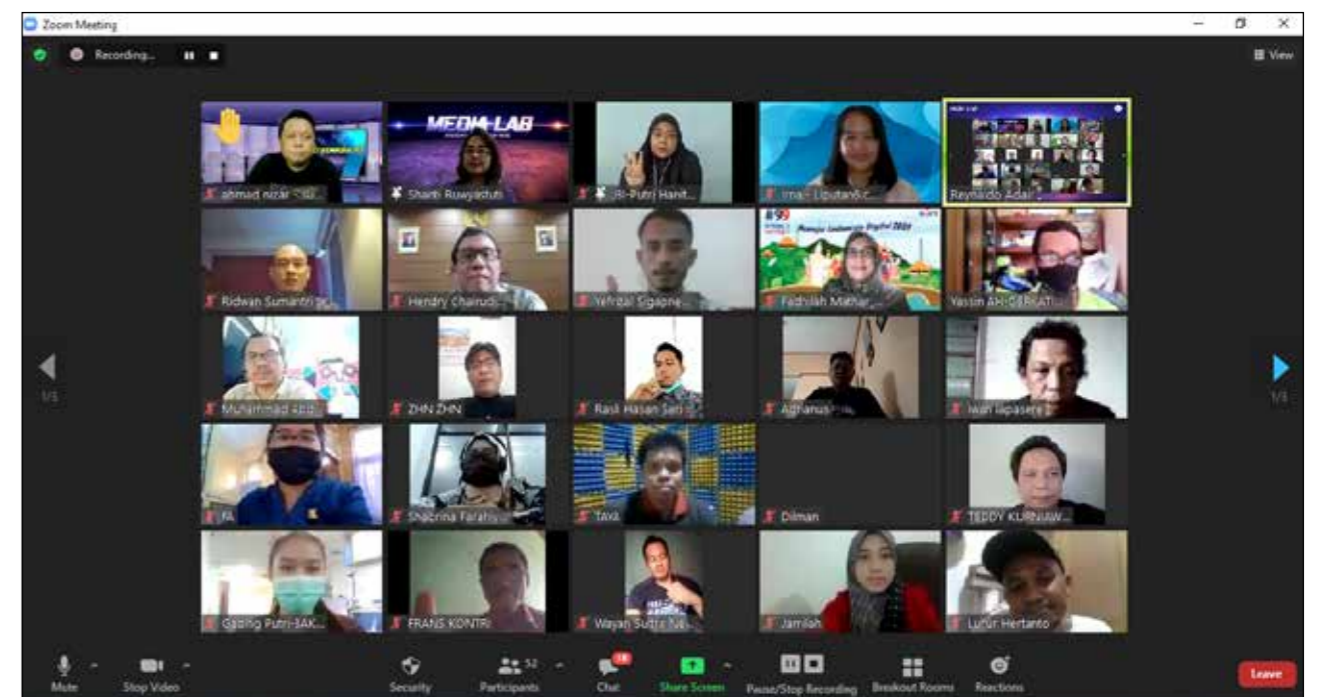
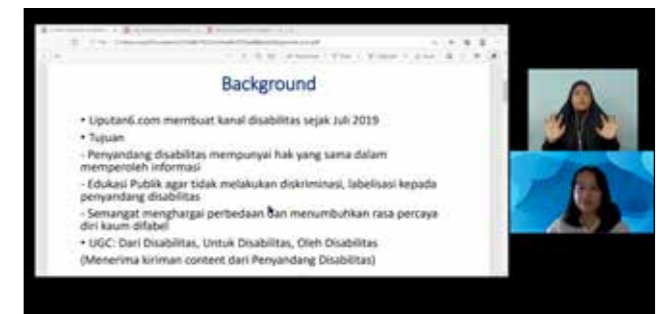


**PERTEMUAN** antara Dewan Pers dengan Para Konstituen Dewan Pers. Dalam pertemuan tersebut membahas Maklumat yang dikeluarkan oleh Polri pada tanggal 1 Januari 2021 dan siaran pers dari Komunitas Pers yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (4/1/2021).

# GALERI DEWAN PERS

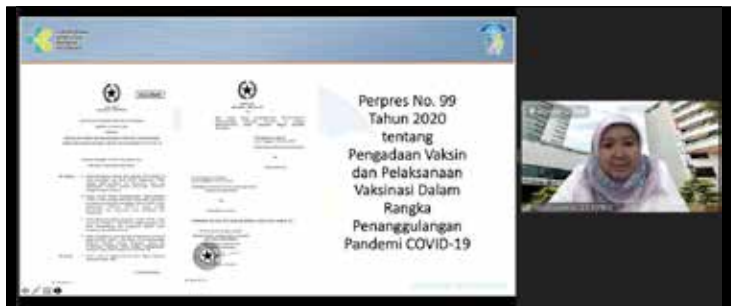
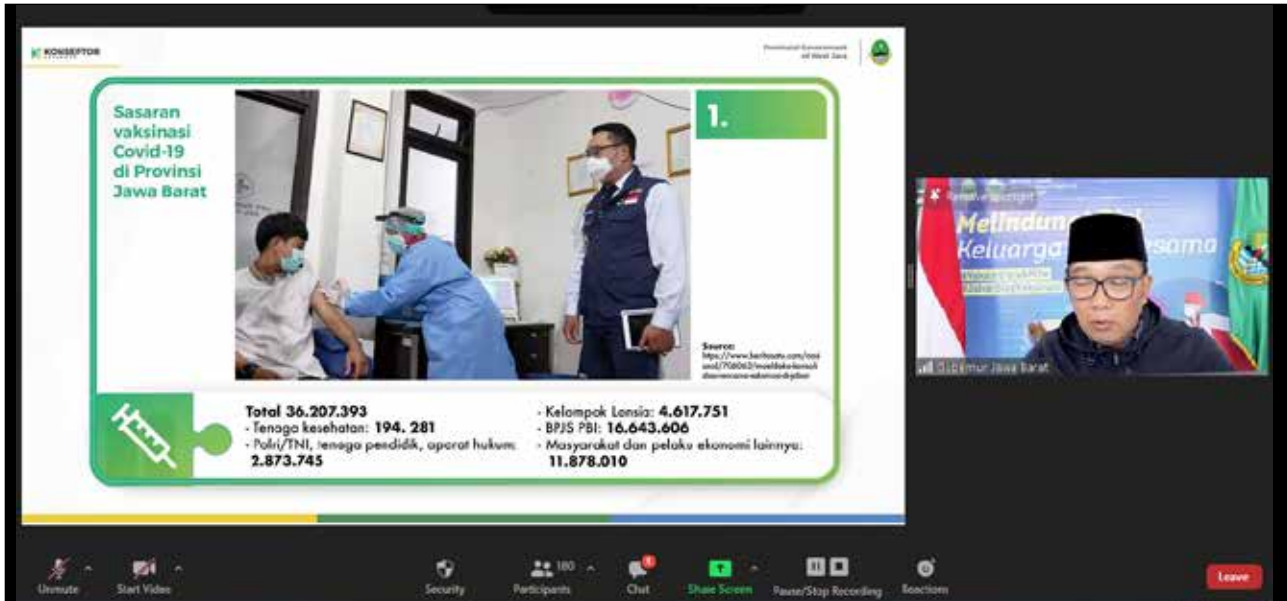


"DEWAN PERS menyelenggarakan Talk Show Media Lab dengan tema "Hari Pers Nasional: Pedoman Pemberitaan dan TIK Ramah Disabilitas" secara daring pada Kamis (28/01/2021). Dalam talk show tersebut hadir sebagai narasumber yaitu, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun; Humas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Ridwan Sumantri; Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Fadhliah Mathar; dan Pemimpin Redaksi liputan6.com, Irna Gustiawati; serta dimoderatori oleh Tenaga Ahli Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Shanti Ruwyastuti.





# GALERI DEWAN PERS



“DEWAN PERS bekerja sama dengan BBC Media Action dan British Embassy mengadakan Webinar berjudul “Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku Dan Diseminasi Informasi” dengan tema “Keterbukaan, Akuntabilitas dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin COVID-19” pada Jumat, (22/1).



Hadir sebagai narasumber yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil; Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M. Faqih; Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun; Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Tri Agung Kristanto dan dimoderatori oleh Helena Rea.



Webinar tersebut membahas dan mendiskusikan tentang bagaimana distribusi vaksin COVID-19 seluruh Indonesia, siapa-siapa saja yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin tersebut, dan bagaimana Pemerintah menyiapkan sistem yang transparan, akuntabel dan berkeadilan dalam program vaksinasi covid-19.”